

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pariwisata telah lama menjadi penyokong besar bagi perekonomian di Indonesia. Pariwisata sendiri dikedepankan sebagai suatu identitas yang merepresentasikan daerah kepada daerah lain.¹ Garis khatulistiwa melintasi wilayah Indonesia, menghasilkan iklim yang mendukung keanekaragaman flora dan fauna, yang menarik para wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia. Secara geografis, Indonesia memiliki banyak potensi untuk menjadi tujuan wisata yang terkenal karena hutan hujan tropis, pegunungan, pantai, dan lautannya, serta budayanya yang beragam. Indonesia terkenal dengan daya tarik wisatanya, baik alam maupun budaya.²

Pariwisata diperlukan untuk mendorong pemerataan, peluang usaha, dan keuntungan dalam menghadapi perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Karena begitu banyak orang mengandalkan pariwisata untuk menggerakkan ekonomi lokal, pemerintah Indonesia membuat kebijakan yang berupaya memperkuat infrastruktur di bidang pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan dan mendorong pertumbuhan pariwisata yang berkelanjutan.

¹ Sukirman, "Apakah Anggaran Pemasaran Pariwisata Pemerintah Efektif dalam Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisatawan? (Studi Kasus di Indonesia Tahun 2011-2016)", *Tourism and Hospitality Essentials (THE) Journal*, Volume 7 Nomor 2, 2017, hlm. 121.

² Choridotul Bahiyah dkk, "Strategi Pengembangan Potensi Pariwisata di Pantai Duta Kabupaten Probolinggo", *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Volume 2 Jilid 1, 2018, hlm. 95-103

Menurut UU tersebut, pengembangan pariwisata tidak hanya difokuskan hanya pada peningkatan kualitas objek, pengembangan daya tarik objek wisata, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Melainkan pariwisata dikembangkan untuk mempertahankan kebermanfaatan pariwisata dalam jangka waktu yang panjang atau berkelanjutan.

Desa wisata dengan penduduk setempat sebagai pelaku utamanya merupakan salah satu alternatif metode pengembangan pariwisata. Desa wisata adalah kawasan pedesaan yang memiliki sejumlah keunikan untuk menarik wisatawan. Memberikan suasana yang akurat merepresentasikan kehidupan pedesaan dari segi sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, dan kehidupan sehari-hari, serta memiliki arsitektur dan aktivitas khas serta, memiliki potensi untuk mengembangkan komponen pariwisata yang berbeda.³

Pengembangan desa wisata merupakan perubahan terencana yang membutuhkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh. Agar dapat terus berinovasi dan berkreasi dalam mengembangkan kawasan desa yang dijadikan sebagai desa wisata, maka pengelolaan desa wisata berbasis masyarakat memerlukan kepedulian dan keterlibatan masyarakat itu sendiri. Dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian atau pemanfaatan, pemantauan, penikmatan hasil, dan penilaian, peran atau partisipasi masyarakat dapat terlihat. Kemampuan dan tingkat penerimaan penduduk setempat yang akan ditransformasikan menjadi desa wisata harus menjadi pertimbangan dalam

³ Asep Parantika dkk, "The Development of Thematic Tourist Village of Mulyaharja Bogor Based on Community Empowerment Approach", *TRJ Tourism Research Journal*, Vol. 4 No. 2, 2020, hlm. 113-132

pendirian desa wisata ini. Tujuannya untuk menentukan secara tepat jenis dan derajat pemberdayaan masyarakat serta karakter dan kemampuan masyarakat yang dapat digunakan dalam pengembangan desa wisata.

Pariwisata telah berkembang menjadi berbagai bentuk, salah satunya adalah pariwisata berbasis masyarakat. Dengan menempatkan fokus pada nilai-nilai kelestarian lingkungan, sosial, dan budaya untuk membantu pengunjung memahami dan belajar tentang cara hidup penduduk setempat. Pariwisata Berbasis Masyarakat atau yang sering disebut sebagai *Community Based Tourism (CBT)* adalah jenis pariwisata yang dikelola oleh masyarakat sekitar.

Pariwisata berbasis masyarakat, atau CBT, didefinisikan sebagai jenis pariwisata yang memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengelola, berpartisipasi, dan mengembangkan pariwisata. Masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam bisnis pariwisata juga mendapat manfaat dari CBT, yang menyerukan pemberdayaan politik, demokratisasi, dan distribusi manfaat kepada masyarakat kurang mampu di pedesaan.⁴

Pembangunan berbasis masyarakat *Community Based Tourism (CBT)* memungkinkan bagi masyarakat pedesaan untuk berperan serta dalam pengembangan wisata ditawarkan oleh model pengembangan *community based tourism (CBT)*. Faktor yang paling krusial dalam terciptanya desa wisata adalah peran masyarakat setempat sebagai pemangku kepentingan. Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan dipraktikkan dalam komunitas

⁴ Brian Garrod, *Local Participation in The Planning and Management of Eco-Tourism: A Revised Model Approach*, (Bristol: University of The West England, 2001)

pariwisata. Diharapkan dengan terciptanya desa wisata, kesetaraan sejalan dengan gagasan pembangunan pariwisata berkelanjutan akan tercapai.⁵

Desa wisata yang menganut konsep ekowisata akan memungkinkan sebuah desa untuk menjaga kelestarian lingkungan alam dan budayanya. Pertumbuhan desa wisata mungkin menguntungkan bagi penduduk desa itu sendiri juga dengan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat dan menurunkan angka pengangguran. Komunitas berbasis pariwisata juga dapat membantu desa menjadi mandiri dengan menawarkan kesempatan kerja yang berbeda kepada penduduk setempat.

Namun, dalam tahapan pembangunan desa wisata berbasis masyarakat dalam prakteknya dapat menghadapi berbagai permasalahan. Seperti, peran komunitas yang kurang optimal dalam pengelolaan pengembangan desa wisata berbasis masyarakat (*community based tourism*) atau pun kurangnya antusias masyarakat sekitar akan desa wisata ini.

Salah satu contoh pengembangan desa wisata berbasis masyarakat yaitu Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi. Desa Wisata Hegarmukti yang terletak di Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi merupakan salah satu wisata di Kabupaten Bekasi, desa ini seluas 7,5 km². Di Desa Wisata Hegarmukti, pengunjung bisa menikmati memancing secara gratis serta terdapat wahana air yang juga gratis yaitu, Gowes Bebek dan Gowes Sepeda di sekitar pinggir Situ Rawa Binong. Desa Wisata Hegarmukti juga tetap menjaga budaya dan tradisi warisan

⁵ A.J Sidiq dkk, "Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata Linggarjati Kuningan, Jawa Barat", *Prosiding KS: Riset & PKM*, Vol. 4 No. 1, 2004, hlm. 1-140.

leluhur, salah satunya dengan berdirinya sanggar seni dan budaya Cahaya Gumelar yang secara rutin memberikan pengetahuan tentang kesenian khususnya kesenian Sunda.⁶

Situ Rawa Binong, atau lebih tepatnya danau buatan yang dibangun pada masa penjajahan Belanda untuk menyimpan persediaan air yang mengalir irigasi dan persawahan, merupakan sumber kehidupan yang diwariskan kepada masyarakat Desa Hegarmukti. Situ Rawa Binong sangat dihormati dan dijaga oleh masyarakat setempat. Buktinya, warga Desa Hegarmukti tetap memegang teguh tradisi hingga saat ini dengan menggelar upacara adat setiap tahunnya. Seperti, pada setiap bulan Maulud dimeriahkan dengan perayaan budaya bernama Sedekah Bumi dan Pesta Hajat di Situ Rawa Binong yang menampilkan budaya dan kearifan lokal khas Desa Hegarmukti. Praktik budaya ini tidak lebih dari cara warga sekitar untuk mengungkapkan rasa terima kasih atas hasil panen yang berlimpah dan sangat dinantikan setiap tahunnya.⁷

Sayangnya, potensi yang dimiliki oleh wisata air di Situ Rawa Binong belum terealisasi sepenuhnya karena Pokdarwis belum terlalu aktif. Banyak orang yang masih belum mengetahui keberadaan Situ Rawa Binong. Situ Rawa Binong terletak di lokasi yang sangat strategis, dekat dengan Kawasan Meikarta, Deltamas, dan Kawasan Jababeka. Namun, sebagian besar wisatawan hanya mengenal Kawasan

⁶ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, “Desa Wisata Hegarmukti”, (<https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/hegarmukti>), Diakses pada 3 November 2022)

⁷ Astuti R.F dkk, “Perencanaan dan Perancangan Objek Wisata Situ Rawa Binong dengan Konsep Arsitektur Ekologi di Desa Hegarmukti”, *Jurnal Prosiding SAINTEK: Sains dan Teknologi*, Vol. 1 No. 1, 2022, hlm. 743

Meikarta, salah satu penyebabnya adalah kurang aktifnya pokdarwis dari Desa Wisata Hegarmukti yang mempromosikan wisata di Situ Rawa Binong.⁸

Pokdarwis, akronim dari Kelompok Sadar Wisata, adalah kelompok atau komunitas yang dibentuk oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya mengembangkan potensi pariwisata berbasis masyarakat. Tujuan pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat di sekitar lokasi pariwisata tentang pentingnya partisipasi mereka secara langsung dalam menjaga dan mengoptimalkan potensi objek wisata di daerahnya. Dengan adanya Pokdarwis, diharapkan masyarakat dapat memahami kepariwisataan dengan baik dan turut serta dalam meningkatkan potensi pariwisata di wilayah tersebut.⁹

Ada tiga alasan penting dilakukannya pengembangan pariwisata di pedesaan, yaitu:

1. Pariwisata pedesaan adalah salah satu pilihan yang layak untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi pedesaan. Melalui pariwisata ini, infrastruktur, kewirausahaan, aliran modal masuk, dan aliran barang dan jasa akan diperbaiki.
2. Masyarakat pariwisata pedesaan adalah salah satu cara yang mungkin untuk meningkatkan kapasitas pedesaan yang mana saat ini wilayah pedesaan masih terjebak dalam pusaran kemiskinan yang kuat. Ditandai dengan aktivitas non-

⁸ Hasyim W, dkk, "Pemberdayaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Bagi Pengembangan Potensi Situ Rawa Binong di Desa Wisata Hegarmukti", *Jurnal IKRATH-ABDIMAS*, Vol. 5 No. 3, 2022, hlm. 57

⁹ Rahmawati, Meiliana Dyah. "Peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dalam Pengembangan Pariwisata Sebagai Upaya Peningkatan Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus Wisata Pantai Sine Di Kabupaten Tulungagung)", Skripsi: UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2019, hlm. 81-82

pertanian yang rendah, keterbatasan infrastruktur, dan akses yang terbatas terhadap jasa-jasa penting. Berdasarkan hal ini, sangat penting untuk meningkatkan peluang sumber daya ekonomi desa dan salah satu cara agar bisa meningkatkan peluang tersebut adalah melalui sektor pariwisata.

3. Pariwisata pedesaan memiliki potensi untuk mempercepat pertumbuhan, diversifikasi, dan kestabilan ekonomi, meningkatkan pendapatan melalui peningkatan kesempatan kerja, mengurangi kemungkinan migrasi ke kota sambil menjaga keseimbangan distribusi penduduk, perbaikan dan pemeliharaan layanan publik dan infrastruktur dasar, dan revitalisasi industri di pedesaan.

Pendekatan berbasis masyarakat dalam pengembangan pariwisata bertujuan untuk meningkatkan peran dan inisiatif masyarakat sebagai pemangku kepentingan, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif dan strategis sebagai subjek sekaligus penerima manfaat dari pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Konsep ini menekankan pentingnya peran masyarakat sebagai aktor kunci dalam strategi pengembangan pariwisata. Namun, kenyataannya, peran masyarakat sebagai subjek dan penerima manfaat masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan kapasitas dan kemampuan masyarakat lokal, yang menghambat akses mereka ke industri pariwisata berkelanjutan. Selain itu, pola perencanaan dan pengembangan yang ada juga dapat menimbulkan tantangan lain.¹⁰

¹⁰ I Gede Trunajaya, "Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Kabupaten Badung", Artikel, 2016, hlm.14-15

Dikarenakan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengembangan desa wisata di Desa Hegarmukti relatif rendah. Hal ini dapat disebabkan karena pemerintah cenderung mendominasi proses tanpa melibatkan masyarakat lokal secara aktif. Pendekatan top-down ini dapat menghambat pembangunan berkelanjutan karena tidak sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi lokal. Selain itu, meskipun pembangunan infrastruktur penting bagi pertumbuhan pariwisata, pembangunan tersebut harus diimbangi dengan pelestarian warisan budaya dan kelestarian lingkungan. Dalam beberapa kasus, pembangunan infrastruktur yang pesat dapat menimbulkan dampak negatif seperti meningkatnya timbulan sampah atau hilangnya praktik tradisional.

Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan desa wisata berbasis masyarakat, seperti Desa Hegarmukti di Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi. Pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan untuk proses pengembangan desa wisata ini serta memberikan dukungan finansial dan teknis kepada masyarakat desa untuk mengembangkan potensi wisata yang dimiliki.

Dampak dari menumbuhkan rasa kepemilikan masyarakat lokal terhadap warisan budaya, sumber daya alam, dan pembangunan desa wisata berbasis masyarakat di Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi sangatlah signifikan. Melalui upaya pengembangan dan pelestarian warisan budaya serta sumber daya alam yang dimiliki oleh desa ini, masyarakat lokal dapat merasa memiliki dan bangga akan kekayaan budaya dan alam yang ada di sekitar mereka.

Hal ini juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan desa wisata yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat setempat. Dengan adanya kesadaran akan pentingnya menjaga warisan budaya dan sumber daya alam ini, diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi perkembangan Desa Hegarmukti serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian budaya dan lingkungan di seluruh wilayah Kabupaten Bekasi.

Setelah itu, pemerintah dapat memberikan dana bantuan kepada desa untuk membangun infrastruktur pendukung pariwisata seperti jalan, sanitasi, dan tempat parkir. Dengan adanya infrastruktur yang baik, wisatawan akan merasa nyaman dan aman saat berkunjung ke Desa Hegarmukti. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan pelatihan kepada masyarakat desa tentang bagaimana mengelola destinasi wisata dengan baik dan ramah lingkungan. Selanjutnya, pemerintah juga dapat membantu dalam mempromosikan Desa Hegarmukti sebagai destinasi wisata melalui media sosial atau kampanye pariwisata. Dengan promosi yang efektif, jumlah kunjungan wisatawan ke desa ini akan meningkat sehingga ekonomi masyarakat setempat juga akan terdongkrak.

Namun demikian, pemerintah juga harus memastikan bahwa pengembangan desa wisata berbasis masyarakat tidak merugikan lingkungan dan budaya lokal. Pemerintah harus melakukan pengawasan ketat terhadap aktivitas pariwisata agar tidak merusak alam dan tradisi yang ada di Desa Hegarmukti. Keterlibatan pemerintah sangatlah penting dalam pengembangan desa wisata berbasis masyarakat seperti Desa Hegarmukti. Pemerintah dapat memberikan dukungan finansial, teknis, dan promosi untuk memastikan keberhasilan pengembangan desa

wisata ini. Namun, pemerintah juga harus menjaga keseimbangan antara pembangunan pariwisata dengan pelestarian lingkungan dan budaya lokal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dituliskan di atas, maka dapat diambil rumusan masalah dari penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Lokasi penelitian pengembangan desa wisata berbasis masyarakat di Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi ini dipilih karena mempunyai potensi wisata yang menarik dan terletak di lokasi strategis.

Selain itu, adapun tujuan lain dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengulas dan menganalisis pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Desa Wisata Hegarmukti, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi

1.4 Manfaat Penelitian

Penulisan penelitian ini dilakukan dengan maksud membawa manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian yang dilakukan dapat menjadi sumber rujukan informasi dalam perkembangan ilmu bidang politik dan pemerintahan, terutama dalam bidang pengembangan desa wisata berbasis masyarakat (*community based tourism*); dan;
- b. Penelitian ini dapat menjadi referensi pembelajaran tentang pengembangan desa wisata berbasis masyarakat (*community based tourism*).

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Sebagai sumber bacaan bagi pembaca atau masyarakat tentang pengembangan desa wisata berbasis masyarakat (*community based tourism*) di Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi.

1.5 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang mengangkat topik desa wisata berbasis masyarakat (*community based tourism*) ini memerlukan bahan penelitian terdahulu untuk menjadi acuan, yaitu Jurnal Kybernan “Pengembangan Desa Wisata Taman Limo Desa Jatiwangi Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi” oleh Farhattul Awalia Yusuf dan Elvira Suryani, Universitas Islam 45 Bekasi (2021). Penelitian ini mengkaji tentang pengembangan Desa Wisata Taman Limo di Desa Jatiwangi Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan indikator-indikator seperti, atraksi di Wisata Taman Limo yang menarik, menunjukkan bahwa pertumbuhan Desa Wisata Taman Limo telah berkembang dengan baik, serta terdapat fasilitas sarana dan

prasarana pendukung yang berperan penting untuk usaha meningkatkan kepuasan konsumen.

Jurnal Kawistara “Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata Jatiluwih, Tabanan Bali” oleh Made Heny Urmila Dewi, Universitas Udayana Bali (2013). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang mengkaji tentang keterlibatan masyarakat lokal dilibatkan dalam pengembangan desa wisata serta perumusan model pembangunan desa wisata yang mengutamakan partisipasi masyarakat lokal di desa wisata Jatiluwih Kabupaten Tabanan, Bali. Penelitian ini menunjukkan masyarakat lokal belum dilibatkan dalam pembangunan desa wisata di Jatiluwih karena terlalu mendominasinya peran pemerintah. Padahal, seharusnya pemerintah menjadi fasilitator dengan memberikan peran dan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat lokal.

Jurnal Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik “Penerapan Konsep Community Based Tourism (CBT) di Desa Wisata Candirejo Borobudur Mewujudkan Kemandirian Desa” oleh Retno Dewi Pramodia Ahsana, dkk. dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar Magelang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan bersifat induktif yang mengkaji tentang pengaruh penerapan konsep Community Based Tourism (CBT) dalam mewujudkan kemandirian desa Candirejo. Penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan pendapatan serta ekonomi melalui interaksi sosial, keterlibatan masyarakat, serta perubahan pola pikir. Dengan

tercapainya indikator tersebut, maka kemandirian desa telah terpenuhi. Hal tersebut tidak luput dari campur tangan pemerintah.

Jurnal Plano Madani “Pengembangan Desa Wisata Berbasis Community Based Tourism Pada Kawasan Danau Lanau Lumbok Seminung Lampung Barat” oleh Dwi Bayu Prasetya dan Zulqadri Ansar dari Program Studi Perencanaan Wilayah Kota, Jurusan Infrastruktur dan Kewilayahan Institut Teknologi Sumatera (ITERA). Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang mengkaji tentang pengembangan dan pengelolaan desa wisata di kawasan wisata Danau Ranau Lumbok Seminung. Penelitian ini menunjukkan dalam meningkatkan strategi pemasaran wisata Danau Ranau di Kecamatan Lumbok Seminung diperlukan pemasaran, khususnya *branding*, *advertising*, dan *selling*. Peningkatan layanan seperti aksesibilitas, sarana, dan prasarana di Kawasan Danau Ranau Kabupaten Lumbok Seminung adalah beberapa strategi dan pendekatan yang dapat diterapkan dengan konsep Community Based Tourism (CBT) di kawasan tersebut. Untuk memudahkan akses ke Danau Ranau, perlu disediakan transportasi umum dari Kota Liwa di Lampung Barat, dan jalan menuju kawasan tersebut perlu diperlebar. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat Kelurahan Lumbok Seminung harus dilakukan, serta diperlukan kerjasama dan pengawasan yang baik dengan pihak kelurahan.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Community Based Tourism

Community Based Tourism (CBT) diterjemahkan Anstrand dalam Janianton Damanik sebagai pariwisata yang mempertimbangkan dan meletakkan kelestarian lingkungan, sosial, dan budaya, yang diatur dan dimiliki oleh masyarakat, untuk masyarakat. Anstrand melihat CBT dari perspektif pengembangan kapasitas masyarakat dan lingkungan daripada ekonomi, dengan sisi ekonomi bertindak sebagai efek seiring faktor sosial, budaya, dan lingkungan.¹¹

Menurut Suansri, *Community Based Tourism* (CBT) didefinisikan sebagai perjalanan yang mempertimbangkan isu-isu lokal tentang kelestarian lingkungan, sosial, dan budaya. *Community Based Tourism* (CBT) adalah teknik pelestarian lingkungan dan pengembangan masyarakat.¹²

Community Based Tourism (CBT) yang didefinisikan oleh Pantin dan Francis sebagai asimilasi dan kolaborasi pendekatan dan alat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengkajian, pengembangan, dan pemasaran sumber daya alam serta sumber daya dari komunitas budaya lokal.¹³

Ada dua metode untuk menerapkan konsep perencanaan dalam konteks pariwisata menurut Garrod. Pertama, yang sering dikaitkan dengan sistem perencanaan formal, menekankan potensi keuntungan dari ekowisata. Kedua, lebih menitikberatkan pada ketentuan dan pengaturan yang lebih berimbang antara pembangunan dan perencanaan yang diatur, dan sering disebut sebagai perencanaan

¹¹ Damanik J dkk, *Perencanaan Ekowisata: Dari Teori ke Aplikasi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2006)

¹² Potjana Suansri, *Community Based Tourism Handbook*, (Thailand: REST Project, 2003), hlm. 11

¹³ D Pantin dkk, *Community Based Sustainable Tourism*, (2005: UWI SEDU), hlm. 1-2

partisipatif. Strategi ini memberikan penekanan yang kuat pada pertimbangan dampak pertumbuhan ekowisata terhadap lingkungan. Menerapkan *Community Based Tourism* (CBT) sebagai strategi pembangunan merupakan salah satu contoh perencanaan partisipatif untuk pembangunan pariwisata.¹⁴

Teori pengembangan desa wisata adalah salah satu bentuk wisata alternatif yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan di pedesaan. Hal ini mempunyai prinsip-prinsip seperti, melibatkan pemanfaatan sarana prasana lokal, bermanfaat langsung bagi masyarakat setempat, berskala kecil untuk memastikan terjalinnya hubungan yang saling menguntungkan dengan masyarakat lokal, adanya keterlibatan aktif dari masyarakat, dan dalam menerapkan pengembangan produk wisata pedesaan terdapat beberapa kriteria yang mendasarinya. Prinsip ini juga berfokus pada beberapa kriteria fundamental, seperti penyediaan fasilitas lokal untuk mendorong partisipasi masyarakat serta meningkatkan pendapatan dari sektor pertanian tradisional. Ini juga mencakup pentingnya peran penduduk setempat dalam pengambilan keputusan terkait pariwisata yang memanfaatkan lingkungan mereka.

Dalam perencanaan desa wisata, penting untuk mempertimbangkan bahwa tidak semua area di wilayah pariwisata harus menjadi objek wisata. Potensi desa wisata sangat bergantung pada kemauan kreatif, inovatif, dan kolaboratif masyarakat setempat. Desa yang menjadi pusat perhatian pengunjung harus memiliki ciri khas yang unik, terletak dekat dengan alam yang menakjubkan, terhubung dengan kelompok budaya menarik, serta memiliki potensi

¹⁴ Brian Garrod, Op.cit.

pengembangan infrastruktur dan sarana lainnya. Namun, perencanaan pariwisata di desa bukanlah tugas yang mudah, terutama ketika melibatkan lingkungan alam dan budaya yang sensitif.

Teori pengembangan desa berbasis masyarakat (Community Based Tourism/CBT) yang diusulkan oleh Sunaryo pada tahun 2013 adalah tentang pendekatan pembangunan pariwisata yang menekankan peran serta aktif masyarakat lokal dalam pengelolaan dan manfaat dari potensi wisata di daerah mereka. Konsep ini bertujuan untuk membangun pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya guna bagi masyarakat setempat. Salah satu prinsip utama CBT adalah keterlibatan langsung masyarakat dalam merencanakan, mengelola, dan mengendalikan sumber daya wisata di lingkungan mereka. Ini melibatkan pembangunan kapasitas lokal, pendidikan, dan pelatihan agar masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berperan serta secara efektif dalam industri pariwisata.¹⁵

Sunaryo juga menekankan pentingnya kerjasama antara masyarakat lokal, pemerintah, dan pihak swasta dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip CBT. Kolaborasi ini diperlukan untuk menciptakan lingkungan di mana masyarakat dapat terlibat secara aktif, sambil memastikan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

Murphy dikutip dari Sunaryo mengemukakan bahwa esensi dari pembangunan sektor pariwisata tidak dapat dipisahkan dari keistimewaan

¹⁵ Sunaryo, Bambang. (2013). Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. 1st ed. Yogyakarta: Gava Media.

komunitas lokal, termasuk unsur-unsur fisik dan non-fisik seperti tradisi dan budaya, yang menjadi pendorong utama kegiatan wisata itu sendiri. Pariwisata perlu dipandang sebagai aktivitas yang berakar pada komunitas. Pengertian pariwisata berbasis masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan pengelolaan pariwisata yang memberikan kesempatan bagi masyarakat lokal untuk mengendalikan dan berperan aktif dalam manajemen serta pengembangan sektor pariwisata yang ada.
2. Menciptakan sistem pengelolaan pariwisata yang memberikan peluang kepada masyarakat yang terlibat secara langsung dalam usaha-usaha pariwisata untuk memperoleh manfaat dari aktivitas pariwisata yang ada.
3. Menghasilkan bentuk pariwisata yang mengedepankan pemberdayaan secara sistematis dan demokratis, serta distribusi manfaat yang adil kepada masyarakat di destinasi wisata.¹⁶

Dalam intinya, prinsip teori pengembangan desa berbasis masyarakat menekankan pentingnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata sebagai cara untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Menurut Isnaini Mualissin yang dikutip oleh Suryo Sakti Hadiwijoyo, terdapat sejumlah konsep pariwisata yang berfokus pada partisipasi masyarakat dalam pengembangan komunitas. Ini dapat dijadikan sebagai alat pengembangan komunitas, baik oleh pemerintah maupun masyarakat setempat. Konsep-konsep tersebut meliputi:

¹⁶ Ibid

- a. Berperan dalam memperluas pengetahuan melalui pertukaran budaya lintas wilayah hingga antarnegara (cross-cultural learning).
- b. Melestarikan identitas dan kekhasan budaya daerah.
- c. Mengemas dan memasarkan aspek-aspek yang menjadi kebanggaan masyarakat.
- d. Menjaga keberlangsungan ekosistem dalam jangka panjang.
- e. Mendistribusikan keuntungan secara adil dan merata kepada seluruh anggota masyarakat.
- f. Mengakui, menghormati, dan mempublikasikan bisnis wisata yang dimiliki dan dijalankan oleh masyarakat lokal.
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.
- h. Melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan dari awal.
- i. Menyumbangkan sebagian dari keuntungan yang ditetapkan untuk perencanaan pembangunan yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat.
- j. Menghargai keberagaman budaya serta martabat individu.¹⁷

Keberadaan alat pengembangan komunitas bagi masyarakat lokal dalam konteks pariwisata dapat dipahami dari seberapa besar peran para pemangku kepentingan seperti pemerintah, sektor swasta, dan terutama masyarakat itu sendiri dalam mengembangkan potensi pariwisata. Dominasi peran masyarakat dalam pembangunan pariwisata harus menjadi prioritas utama, terutama dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah dan sektor swasta.

¹⁷ Hadiwijoyo, Surya Sakti. 2012. *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat (Sebuah Pendekatan Konsep)*. Yogyakarta : Graha Ilmu, hlm. 18-19.

Menurut Departemen Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2009, terdapat enam aspek utama yang menjadi fokus penting dalam upaya pengembangan desa wisata.

Isu-isu tersebut mencakup:

1. Kewirausahaan di Masyarakat Pedesaan

Upaya untuk meningkatkan potensi masyarakat lokal dan memastikan pertumbuhan jangka panjang desa wisata melalui pengembangan keahlian dan pengetahuan kewirausahaan di tingkat desa. Ini melibatkan tantangan seperti penyediaan pelatihan, kerjasama dengan para pemangku kepentingan, serta pemberian subsidi oleh pemerintah.

2. Barometer Ekonomi

Pertumbuhan desa wisata diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian desa melalui peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

3. Sumber Daya

- a. Sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dalam mengelola dan menyajikan produk serta layanan kepada pengunjung.
- b. Media informasi yang memperlihatkan karakteristik unik desa merupakan sarana penting dalam proses branding yang saat ini sangat diperlukan.

4. Kelestarian

Pengembangan desa wisata yang berbasis pada partisipasi masyarakat bertujuan untuk menghindari degradasi lingkungan. Fokus utama dalam pembangunan ini adalah melindungi lingkungan serta mempertahankan keunikan dan kekhasan desa.

5. Integrasi Pariwisata Global

Upaya integrasi ke dalam sistem pariwisata global, baik melalui inisiatif masyarakat lokal maupun arahan pemerintah, bertujuan untuk membuka akses pasar bagi desa wisata melalui layanan pemasaran yang dilakukan oleh operator tur dan perjalanan.

6. Kerangka Lembaga

Keberadaan lembaga seperti kelompok sadar wisata menjadi penting untuk mengarahkan strategi keberlanjutan desa wisata dengan memperkuat partisipasi masyarakat lokal dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam proses pengembangan.

Menurut Timor Mahardika pada tahun 2001, pemerintah dan organisasi non-pemerintah (NGO) memiliki peran dan langkah-langkah kunci dalam membentuk desa wisata. Langkah-langkah tersebut mencakup:

1. Peningkatan Kesadaran, membangkitkan pemahaman di kalangan masyarakat agar mereka menyadari potensi yang dimiliki untuk mengembangkan desa wisata yang dikelola oleh komunitas lokal. Proses ini dimulai dengan penciptaan pemahaman yang berdampak pada tindakan serta kesadaran, sebagai langkah awal untuk mengembangkan strategi tindakan dan menerapkannya.
2. Mobilisasi Masyarakat, upaya pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran akan situasi yang mereka hadapi, termasuk lingkungan sekitar mereka. Ini juga mencakup dorongan untuk masyarakat bertindak terhadap masalah yang ada serta memenuhi kebutuhan mereka dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal.
3. Pemberian Sumber Daya Manusia, membantu masyarakat dalam mengidentifikasi dan memanfaatkan potensi yang ada, khususnya dalam

pengelolaan sumber daya alam dan manusia, sehingga mereka dapat lebih efektif dalam memanfaatkannya.¹⁸

1.7 Operasionalisasi Konsep

Berdasarkan kerangka teori yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diterjemahkan definisi konsep dari variabel di atas sebagai berikut:

a. Community Based Tourism

Teori pengembangan desa wisata berbasis masyarakat (community-based tourism) adalah pendekatan dalam industri pariwisata yang mengutamakan peran serta dan manfaat langsung bagi masyarakat lokal dalam perencanaan, pengembangan, dan manajemen destinasi pariwisata mereka. Konsep ini menekankan pemberdayaan komunitas lokal untuk menjadi aktor utama dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, budaya, dan warisan lokal mereka sebagai daya tarik wisata. Inti dari teori ini adalah:

1. Partisipasi Aktif Masyarakat

Masyarakat lokal terlibat dalam pengambilan keputusan terkait dengan pengembangan pariwisata di wilayah mereka. Mereka memiliki suara dalam merencanakan dan mengelola destinasi pariwisata. Prinsip-prinsip utama dari teori partisipasi masyarakat meliputi transparansi informasi, akses yang adil terhadap kesempatan partisipasi, adanya mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk berbicara dan diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan, serta adanya

¹⁸ Timor mahardika. (2001). *Pendidikan politik pembangunan desa*. Pustaka utama: Yogyakarta.

dukungan untuk pengembangan kapasitas dan keterampilan yang diperlukan agar partisipasi tersebut efektif.

2. Kesejahteraan Komunitas

Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal melalui aktivitas pariwisata. Hal ini dilakukan dengan memastikan distribusi manfaat yang adil dan berkelanjutan.

3. Pelestarian Budaya dan Lingkungan

Teori ini menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan serta melestarikan warisan budaya dan identitas lokal dalam pengembangan pariwisata.

4. Kemitraan dan Kolaborasi

Melibatkan kerjasama antara masyarakat lokal, pemerintah, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah untuk memastikan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi semua pihak terkait.

Teori ini mendorong adanya tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan, mendukung ekonomi lokal, dan memelihara keunikan budaya dalam rangka menjaga keberlanjutan destinasi pariwisata.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini akan dikaji permasalahan tentang pelestarian nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat yang menjadi potensi pariwisata pada Desa Hegarmukti, hal ini membutuhkan sejumlah data lapangan yang aktual.

Definisi dari penelitian kualitatif itu sendiri menurut Nasution adalah pendekatan kualitatif pada dasarnya adalah mengamati orang di lingkungan mereka, terlibat dalam percakapan dengan mereka, dan berusaha memahami bahasa dan persepsi mereka tentang dunia di sekitar mereka. Lalu, peneliti menafsirkan bahasa, memberikan laporan mendalam tentang pendapat yang didapat dari informan, serta melakukan penelitian dalam situasi alamiah. Maka dari itu, pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mengumpulkan banyak data deskriptif dan menyajikannya dalam bentuk laporan dan deskripsi, tidak mengutamakan angka dan statistik tetapi tidak mengabaikan data kuantitatif.¹⁹

1.8.2 Subjek dan Lokasi Penelitian

Sekelompok orang yang dimanfaatkan sebagai sumber data dan yang diminta memberikan informasi sesuai dengan topik yang diteliti disebut sebagai subjek penelitian.²⁰ Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah pihak yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan bentuk pariwisata *Community Based Tourism* di Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, dan yang bersedia untuk berbagi informasi. Narasumber dalam penelitian ini mencakup penduduk Desa Hegarmukti, Pemerintah Kecamatan Cikarang di Kabupaten Bekasi, serta komunitas terlibat seperti pokdarwis. Lokasi dari penelitian ini, berpusat pada daerah wilayah Kabupaten Bekasi dengan berfokus di Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang. Alasan dari pemilihan lokasi penelitian ini karena Desa Hegarmukti ini memiliki potensi pariwisata yang besar. Selain itu,

¹⁹ S. Nasution. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. (Bandung: Tarsito. 2003) hlm 27

²⁰ Tantang Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 135

Desa Hegarmukti terletak di daerah yang strategis sehingga memudahkan wisatawan untuk dapat berkunjung, terdapat objek alam yang menarik, seni budaya, serta terdapat juga legenda.

1.8.3 Data Penelitian

Data adalah istilah dari hal-hal tertentu yang berfungsi untuk menyediakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan dikumpulkan melalui metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, data primer dan data sekunder digunakan, untuk penjelasan lebih lanjut dapat dilihat seperti berikut:

1. Data primer

Informasi yang langsung dikumpulkan dari sumber atau objek yang diamati disebut sebagai data primer. Data primer dapat dikumpulkan dari lapangan atau langsung dari subjek penelitian oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah masyarakat Desa Hegarmukti di Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah pengumpulan informasi yang berhubungan dengan objek penelitian dan dilakukan secara tidak langsung, tetapi melalui analisis dokumentasi dan sumber lain berupa buku, jurnal, tesis, serta situs di internet yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Data sekunder dikumpulkan untuk membantu data primer dalam permasalahan dari penelitian.²¹

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 137

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian ini, maka digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan informasi dari narasumber dengan mengajukan pertanyaan. Wawancara menurut Esterberg adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi atau gagasan melalui tanya jawab, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan atau makna dalam suatu topik tertentu.²²

Data yang diperoleh melalui teknik wawancara ini adalah data mengenai pengelolaan desa wisata berbasis masyarakat di Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi. Dalam penelitian ini digunakan metode wawancara berupa wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur ini digunakan untuk mengambil informasi dari tokoh masyarakat atau pun masyarakat lokal Desa Hegarmukti.

2. Observasi

Observasi, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono, merupakan suatu proses kompleks yang terdiri dari berbagai proses biologis dan psikologis. Kemampuan untuk mengamati dan mengingat adalah dua yang paling signifikan.²³ Dalam penelitian ini dilakukan observasi terhadap subjek penelitian yang sudah ditentukan dengan turun langsung ke lokasi penelitian. Kemudian, dilakukan pengamatan terhadap aktivitas pariwisata diantaranya kegiatan perdagangan, penampilan seni

²² Ibid., hlm. 317

²³ Ibid., hlm 167

dan budaya, dan diskusi antar *stakeholder* terkait. Hal ini untuk memperoleh data tambahan mengenai pengelolaan desa wisata berbasis masyarakat di Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan dokumentasi menurut Basrowi dan Suwandi menghasilkan tinjauan kritis terhadap masalah penelitian, memungkinkan pengumpulan data menjadi lengkap, terbukti kebenarannya, dan tidak berdasarkan dugaan. Metode dokumentasi ini adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen, baik dokumen tertulis (skripsi, jurnal dan berita) foto (internet, dokumentasi peneliti), video (dokumenter desa), serta rekaman suara yang didapatkan melalui wawancara sebagai bahan validasi penelitian.²⁴

1.8.5 Analisis dan Interpretasi Data

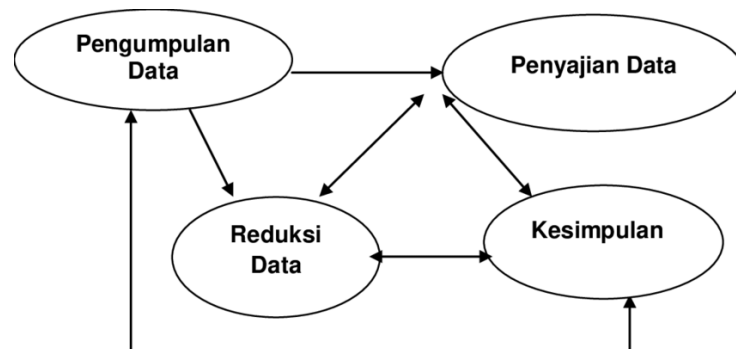
Bekerja dengan data, menyusun atau mengorganisasikannya, serta menguraikannya menjadi tahapan, mensintesisnya, melakukan pencarian dan menemukan pola, memilih apa yang penting dan perlu dipelajari lebih lanjut, dan memutuskan jenis informasi apa yang dapat diberikan kepada individu adalah bagian dari analisis data kualitatif, menurut Bogdan dan Biklen di Moleong.²⁵

Analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini dilakukan selama dan setelah proses pengumpulan data selesai.

²⁴ Basrowi dkk, *Memahami Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), hlm. 158

²⁵ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 248

Gambar 1. 1 Analisis Data Miles dan Huberman



Sumber: Analisis Data Miles & Huberman, 2019

Gambar di atas menggambarkan salah satu dari empat tahapan analisis data penelitian, sesuai dengan teknik analisis data model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi:

1. Pengumpulan Data

Untuk menganalisis model asli, data dari wawancara, observasi, dan berbagai jenis dokumentasi dikategorikan menurut topik penelitian. Data tersebut kemudian disempurnakan lebih lanjut melalui pencarian informasi tambahan.

2. Reduksi Data

Teknik analisis reduksi data adalah metode untuk menyimpulkan setiap bagian dari informasi yang dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hal ini dilakukan agar data dapat dikategorikan dan menjadi lebih tajam sehingga data dapat ditarik hasil kesimpulannya serta dapat diverifikasi.

3. Penyajian Data

Penyajian data, baik dalam bentuk kalimat naratif, skematik, maupun tabel, sangat membantu untuk memahami temuan penelitian secara lebih luas. Oleh karena itu, data penelitian akan dikategorikan atau dikelompokkan dengan menggunakan

deskripsi yang komprehensif dari temuan-temuan yang ada. Tujuannya agar data dapat mudah dibaca dan diproses lebih lanjut.

4. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap ini, dilakukan penarikan kesimpulan dan melakukan verifikasi setelah reduksi dan penyajian data agar data menjadi relevan. Menurut Miles & Huberman, menarik kesimpulan hanyalah salah satu kegiatan yang terlibat dalam keseluruhan konfigurasi. Verifikasi merupakan pemikiran ulang peneliti saat ia menulis, atau diskusi mendalam antara rekan-rekan untuk menghasilkan kesepakatan intersubjektif. Dengan kata lain, makna yang diambil dari data lain harus diperiksa untuk akurasi, ketahanan, dan penerapan, atau validitas agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Kesimpulan akhir tidak hanya harus dicapai selama proses pengumpulan data tetapi juga harus divalidasi.²⁶

²⁶ Milles dkk, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm. 16